

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 19, No. 4, Desember 2014

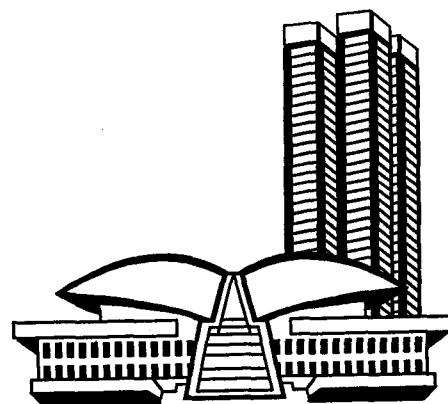
ISSN 0853-9316

- **RELEVANSI OTONOMI KHUSUS BAGI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**
oleh: Riris Katharina

- **DESENTRALISASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA:
POLITIK NEGARA DI TENGAH HUBUNGAN PUSAT-DAERAH**
oleh: Prayudi

- **STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**
oleh: Novianti

- **PEMBARUAN HUKUM ACARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG**
oleh: Fajar Laksono Soeroso



**Diterbitkan oleh
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI**



Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 19, No. 4, Desember 2014

ISSN 0853-9316

Daftar isi

Pengantar Redaksi	i - ii
<ul style="list-style-type: none">• RELEVANSI OTONOMI KHUSUS BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIC INDONESIA oleh: Riris Katharina	275-292
<ul style="list-style-type: none">• DESENTRALISASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: POLITIK NEGARA DI TENGAH HUBUNGAN PUSAT-DAERAH oleh: Prayudi	293 - 310
<ul style="list-style-type: none">• STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL oleh: Novianti	311 - 325
<ul style="list-style-type: none">• PEMBARUAN HUKUM ACARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG oleh: Fajar Laksono Soeroso	327 - 347

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kajian kembali hadir bagi para pembaca melalui Vol. 19 No. 3, Desember 2014. Pada edisi kali ini *Jurnal Kajian* menampilkan hasil penelitian dan kajian dari sudut pandang politik dan hukum. Terdapat empat artikel yang diharapkan mampu memperkaya wawasan pembaca terkait dengan topik yang dipaparkan. Tulisan pertama merupakan hasil penelitian mengenai relevansi otonomi khusus bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi Bali, ditulis oleh Riris Katarina. Meskipun pada awalnya otonomi khusus (otsus) lahir dalam negara federal, namun kehadirannya dalam negara kesatuan tetap dianggap relevan. Tuntutan diberlakukannya otsus bagi Provinsi Bali didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya bahwa Provinsi Bali memiliki budaya dan agama yang berbeda dengan daerah lainnya. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan negara Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otonomi khusus bagi setiap daerah (provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususan tersebut.

Tulisan kedua berjudul “Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: (Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat-Daerah)” yang ditulis oleh Prayudi. Tulisan ini membahas mengenai politik negara dalam mengelola hubungan pusat dan daerah sebagaimana dicerminkan melalui praktek eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang pernah dianut Indonesia. Berdasarkan deskripsi dokumen sejarah terbukti bahwa hubungan negara dengan masyarakat madani dan konstruksi derajat demokratisasi merupakan substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman dalam tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Tulisan ketiga dari Novianti membahas mengenai Status Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Diaspora adalah sebutan bagi kaum migran beserta keturunannya. Status kewarganegaraan ganda (dwikewarganegaraan) bagi diaspora Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia akan menjadi nilai lebih bagi kemajuan Indonesia. Namun pihak yang kontra berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia memiliki potensi masalah yang besar dan rawan disalahgunakan. Berdasarkan perspektif hukum internasional, status kewarganegaraan telah diatur dalam beberapa konvensi. Undang-undang Indonesia hanya mengizinkan status kewarganegaraan ganda ini dimiliki oleh anak sampai berumur 18 tahun. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjadi alternatif utama bagi diaspora Indonesia.

Tulisan terakhir menganalisis mengenai Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, ditulis oleh Fajar Laksono Soeroso. Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang saat ini diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 dianggap belum memadai dalam mewujudkan proses peradilan yang *fair* dan terbuka sebagaimana amanat UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma 1/2011 sekaligus cara-cara yang

dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) cara, yaitu: (1) perubahan atau penyempurnaan oleh MA sendiri; (2) uji materi Perma 1/2011 ke MA; (3) pembaruan hukum acara *judicial review* di MA melalui pembentukan undang-undang; (4) melalui uji tafsir UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman ke MK.

Demikianlah empat tulisan yang terdapat dalam edisi kali ini. Redaksi berharap keempat tulisan tersebut bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi Anggota Dewan yang membutuhkan analisa ilmiah untuk bidang-bidang yang relevan. Semoga jurnal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. Kritik dan saran dari pembaca senantiasa kami harapkan demi perbaikan kualitas *Jurnal Kajian* di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2014

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Riris Katharina (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

RELEVANSI OTONOMI KHUSUS BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, hlm. 275-293

Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian dilatarbelakangi munculnya tuntutan diberikannya status otonomi khusus bagi Provinsi Bali dan beberapa provinsi di daerah kepulauan. Sekalipun pada awalnya otonomi khusus lahir dari sejarah negara federal, namun dalam konteks negara kesatuan, kehadiran otonomi khusus tetap relevan bagi sebuah negara kesatuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otonomi khusus bagi setiap daerah (provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususannya tersebut. Persyaratannya yaitu ada bukti bahwa dengan peraturan otonomi yang ada sulit meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan agar DPR dan Kementerian Dalam Negeri segera merespons tuntutan otonomi khusus bagi sebuah daerah.

Kata kunci: otonomi khusus, Provinsi Bali, provinsi kepulauan, Kemendagri, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prayudi (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

DESENTRALISASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: POLITIK NEGARA DI TENGAH HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, hlm. 295-315

Politik negara seperti dicerminkan eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan cenderung tergantung pada dinamika sistem politik. Sejarah politik desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan interaksi di antara masing-masing komponen. Deskripsi dokumen sejarah membuktikan bahwa hubungan negara terhadap masyarakat

madani dan konstruksi dari derajat demokratisasi tampil menjadi substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang bagi partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman di tengah tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Kata kunci: desentralisasi, sistem pemerintahan, masyarakat madani, demokratisasi, Indonesia

Novianti (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI DIASPORA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, hlm. 317-332

Status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Tulisan ini menganalisis status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana status kewarganegaraan ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur dalam beberapa konvensi internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Status kewarganegaraan ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berumur 18 tahun. Sedangkan status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia meghadapi kendala terkait dengan pendekatan hukum perdata internasional yakni dengan prinsip nasionalitas dan UU No.12 Tahun 2006. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjadi alternatif utama bagi diaspora Indonesia.

Kata kunci: status kewarganegaraan, hukum internasional, diaspora Indonesia, kewarganegaraan ganda, UU No. 12/2006

Fajar Laksono Soeroso (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi)

PEMBARUAN HUKUM ACARA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, hlm. 333-354

Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung/Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Dalam perkembangan praktiknya, Perma tersebut dianggap belum memadai

mewujudkan proses peradilan yang *fair* dan terbuka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma 1/2011 sekaligus mengemukakan pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Pembaruan tersebut terkait dengan mekanisme pengujian, waktu dalam proses dan tahapan peradilan, biaya perkara, pengucapan dan isi putusan, sifat putusan, dan mekanisme peninjauan kembali. Terdapat 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam rangka pembaruan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK, yaitu (1) menyerahkan perubahan Perma pada Mahkamah Agung, (2) melalui pengajuan uji materi Perma Nomor 1 Tahun 2011, (3) mendorong pengaturan ke jalur legislasi, serta (4) melalui uji tafsir UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Perma No. 1/2011, hukum acara, pembaruan hukum, pengujian peraturan, Mahkamah Agung

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Riris Katharina (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

THE RELEVANCE OF SPECIAL AUTONOMY FOR THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, p. 275-293

This essay was based on research conducted in 2013 in response to the raising demands for special autonomy in Bali and several archipelagic provinces in Indonesia. It is argued here that although special autonomy has its historical root in federal states, its existence in a unitary state is relevant and needed. Applying an qualitative approach, this essay comes to conclusion that a country such as Indonesia can consider a special autonomy status to any region or province which has specific characters. Aside from this, there is conditionality that with such autonomy given, they can increase the welfare of their people in the future. The writer recommends the Indonesian House of Representatives (DPR) and the Ministry of Domestic Affairs (Kemendagri) to immediately respond special autonomy aspirations demanded by regions.

Keywords: *special autonomy, Bali Province, archipelagic province, Kemendagri, NKRI*

Prayudi (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

DECENTRALIZATION IN THE INDONESIAN GOVERNMENT SYSTEM: STATE POLITICS IN CENTER-REGION RELATIONS

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, p. 295-315

State politics on decentralization is arguably depended depends on the dynamics of political system. The political history of decentralization in Indonesia since independence disclose interactions among different stakeholders. Historical facts shows that state relation with civil society and the level of democratization becomes determinant factors in every model of the

adopted political system. The writer argues that every rezime needs to strengthen consensus amongst its political elite, as well as its people participation and commitment on pluralism, when it comes to chooses its rights political system.

Keywords: decentralization, government system, civil society, democratization, Indonesia

Novianti (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

DUAL NATIONALITY FOR INDONESIAN DIASPORAS IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Kajian Vol. 19, No. 4, Tahun 2014, p. 317-332

The status of dual nationality for Indonesian diasporas raises the pro- and contra-opinions. It is questioned in this paper how nationality is viewed from the perspective of international law, and how the status of dual nationality is examined based on Law No. 12/2006, and also how the nationality status for the Indonesian diasporas is also viewed. The writer found that the status of nationality in the international law has been regulated in several international conventions such as Universal Declaration of Human Rights and the Covenant on Political and Civil Rights. Dual nationality status according to Law No. 12/2006 is limited for children up to the age of 18 years. Further, the status of dual nationality for Indonesian diasporas has constraints with the implementation the international civil law, particularly with the principle of nationality, and also with Law. No. 16/2006. The writer, therefore, said that an immigration problem solving can be an alternative way out for the Indonesian diasporas.

Keywords: nationality status, international law, Indonesian diaspora, dual nationality, Law No.12/2006

Fajar Laksono Soeroso (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi)

LEGAL REFORM OF THE PROCEDURE LAW ON JUDICIAL REVIEW AT THE INDONESIAN SUPREME COURT

Kajian Vo. 19, No. 4, Tahun 2014, p. 333-354

The mechanism of judicial review of implementing provision of laws is currently regulated under Perma No.1/2011 on the Rights to Judicial Review. In practice, It is still seen that the regulation is not sufficient to uphold the rule of law and to create an open and fair trial mandated by the 1945 State Constitution. This essay argues the need to improve the Perma No. 1/2011 and the efforts to make reform, as well. As a consequence, there are some important issues to be coped with, among others, the mechanism, the judicial process and stages, the cost, the citation and

substance of the decision, the nature of decision, and the absence of reconsideration mechanism. The writer reveals that there are ways of reform of mechanism of judicial review of the implementing provisions of laws, namely (1) sending the proposal of the amendments of the Perma to the Supreme Court, (2) making the judicial review of the Perma No.1/2011 in the Supreme Court, (3) push it to become a legislation, and (4) sending the judicial review of Law on the Supreme Court and Law on Judge to the Constitutional Court.

Keywords: *Perma No. 1/2011, procedure law, legal reform, judicial review, Supreme Court*